BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cirebon secara administratif termasuk kota yang berada di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Cirebon berada di bagian timur Jawa Barat tepatnya di pantai Laut Jawa. Kotamadya Cirebon sebelah barat berbatasan dengan Banjir Kanal, Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. Sebelah utara atau barat laut berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan. Dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Brebes, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.[1]

Kota ini pun secara geografis dapat menghubungkan jalur perekonomian antara Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan letak geografis yang strategis, maka tidak mengherankan kota Cirebon tumbuh dan berkembang sebagai kota pelabuhan, perdagangan, industri dan budaya pariwisata di Jawa Barat.[2] Dengan demikian, Cirebon merupakan sebuah kota dagang yang sangat ramai, dan banyak dilalui oleh para

[1] Adeng, at.al, *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI), 1998, *h*. 9.

[2] *Ibid*, *h*. 9-10.

pedagang asing, baik untuk singgah maupun untuk menetap menjadi masyarakat pribumi Cirebon.

Sejalan dengan hal tersebut, Zaenal Masduqi menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul *Cirebon Dari Kota Tradisional Ke Kota Kolonial* bahwa Cirebon secara territorial geografis terletak di tepian pantai utara Jawa (Pantura), yang dilengkapi dengan sungai-sungai yang sangat penting peranannya sebagai jalur transportasi ke pedalaman yang letaknya di sekitar pelabuhan Cirebon yaitu ; Sungai Cimanuk (Indramayu), Pekik (Jatimerta), Kesunean (Kriyan) dan Cilosari (Cisanggarung).[3] Kondisi alam yang demikian, juga dikemukakan oleh seorang arsiparis (*Lands Archivaris*) dari Belanda yang menyebutkan bahwa sebenarnya kondisi alam Cirebon berpotensi untuk menjadi pusat perkembangan peradaban, karena dengan keberadaannya yang strategis itu seharusnya mampu mengikuti gejala umum kota-kota tua yang letaknya di tepian air.[4] Namun hal tersebut tidak terjadi pada Cirebon, setidaknya pada masa pengaruh Hindu. Pada masa itu Cirebon belum menampilkan daerah atau kota yang berarti, ia sekedar sekumpulan daerah bawahan kekuasaan Hindu yang berpusat di Kawali Galuh disaat pemerintahan

[3] Zaenal Masduqi, *Cirebon Dari Kota Tradisional Ke Kota Kolonial*, (Cirebon: Nurjati Press, 2011), *h*. 9-10.

[4]E.C. Godee Molsbergen, *Uit Cheribon's Geschiedenis Gedengboek der Gementee*, terj. Iwan Satibi, (Majalengka: 2010), *h.* 8.

masih dibawah kekuasaan Niskala Wastu Kancana (1371-1475 M).[5]

Sebelum masuknya Islam, wilayah Cirebon telah dihuni oleh sejumlah penduduk dan telah ada bentuk-bentuk pemerintahan meskipun dalam pola yang masih terbatas. Menurut Manuskrip *Purwaka Caruban Nagari* Karya Pangeran Wangsakerta, di wilayah ini telah berdiri beberapa kerajaan kecil di antaranya Kerajaan Indraprahasta, Singapura, dan Japura.[6] Dalam manuskrip *Negarakretabhumi Sargah II Parwa II,* disebutkan bahwa Cirebon pada mulanya merupakan desa nelayan yang bernama dukuh Pasembangan (sekarang menjadi Komplek Astana Gunung Jati kurang lebih

[5] Mustakim Asteja, dkk, *Warisan Budaya Tak Benda,* (Cirebon : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2020), *h.* 81.

[6] Indrapahasata adalah suatu kerajaan yang berlokasi di Cirebon Girang yang dalam nashkah Negara Kerthabumi disebut dengan gunung Indrakila. Kerajaan ini di pimpin oleh Maharesi Sentanu dengan gelar Prabu Indaswara Sakalakerthabuwana. Sementara Kerajaan Singapura merupakan Kerajaan yang berada di Wilayah Pesisir Utara Cirebon yang dipimpin oleh Ki Gedeng Surawijaya Sakti adik ipar dari Ki Gedeng Kasmaya Penguasa Cirebon Girang (Nagari Wanagiri). Ia menikah dengan Nyai Indang Sakati adik Ki Gedeng Kasmaya, namun pernikahanya tidak dikaruniai keturunan sehingga tampuk kepemimpinannya diberikan kepada keponakannya setelah ia wafat yakni Ki Gedeng Tapa sekaligus sebagai juru Labuan Muara Jati. Dibawah kepemimpinan Ki Gedeng Tapa Nagari Singappura berkembang menjadi Negara yang maju dengan pelabuhan yang sangat ramai. Adapun Negeri Japura merupakan Nagari yang berada disebelah Tenggara Giri Amparan Jati yang meliputi wilayah Astana Japura, Sindang Laut, dan Ciledug yang saat ini wilayah ini termasuk Kabupaten Cirebon. Astana Japura dipimpin seorang Raja yang sangat kuat yakni Prabu Amuk Marugul. Lihat. Atja, *Purwaka Tjaruban Nagari*, (Jakarta: Penerbit Bhratara, 1972), *h*. 26. Lihat juga. Rohmin Dahuri at.al, *Budaya Bahari Sebuah Apresiasi Di Cirebon,* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI), 2004 *h.* 38.

lima kilometer arah utara dari Kota Cirebon). Di dukuh Pasembangan inilah setiap hari selalu ramai dikunjungi orang untuk keperluan dagang. Sebelah timur komplek pemakaman terdapat pelabuhan Cirebon pertama bernama Muara Jati. Pelabuhan ini ramai disinggahi oleh perahu-perahu dagang dari berbagai Negara antara lain Cina, Arab, Parsi, Bagdad, India, Malaka, Tumasik (Singapura), Pasai, Jawa Timur, Madura, dan Palembang.[7] Hilir mudiknya perahu dagang dari berbagai Negara dan wilayah ini menyebabkan dukuh Pasembangan menjadi lebih ramai dan keadaan masyarakatnya makmur dan sejahtera.[8]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jalur pelayaran laut telah mendorong manusia yang berasal dari beragam peradaban untuk saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Hal ini juga yang terjadi di Cirebon, ramainya aktivitas pelabuhan Muara Amparan Jati sebagai jalur perniagaan, mendorong masyarakat melakukan aktivitas perekonomian berupa tukar menukar barang dagangan antara penduduk asli (pribumi) dengan pendatang. Selain aktivitas perekonomian, terjadi pula kegiatan pertukaran budaya dan agama, salah satunya agama Islam.[9] Masuknya agama dan

[7] Anonim, *Negara Kertabhumi Sarga II Parwah II, terj*. TD. Sudjana, (Cirebon: TP 1987), *h.* 48.

[8] Zaenal Masduqi, *Op,Cit, h.* 11-12.

[9] Faisal Arif, *Perubahan Eksistensi Sungai Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial-Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1942,* (Skripsi), (Cirebon: Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), *h.* 29.

kebudayaan Islam yang dibawa oleh para pedagang, membawa pengaruh terhadap satu susunan pusat kota pelabuhan yang bercorak Islam di Cirebon.

Pada mulanya Cirebon hanya sebuah pemukiman yang ditinggali oleh beberapa kepala keluarga yang dikenal dengan wilayah Tegal Alang-Alang (Lemahwungkuk). Berkat usaha di Ki Danusela sebagai kuwu pertama di Lemahwungkuk bersama dengan Pangeran Walangsungsang, daerah ini lama kelamaan menjadi ramai didatangi oleh berbagai suku bangsa baik Sunda, Jawa, Arab dan Cina, hingga disebutlah Caruban artinya bercampurnya berbagai bangsa menjadi satu.[10] Ketenaran dukuh Lemahwungkuk dilatarbelakangi oleh sebuah makanan yang sangat khas yakni *terasi*. Karena makanan tersebutlah dukuh Lemahwungkuk banyak disinggahi oleh masyarakat dari luar padukuhan seperti

[10] Menurut Catatan Sejarawan T.D. Sudjana, Pangeran Walasngsungsang yang berjuluk Ki Somadullah mendapat perintah dari gurunya yaitu Syekh Datukh Kahfi atau Syekh Nurjati atau Syekh Idhofi untuk pergi ke Dukuh Kebon Pesisir, membangun sebuah pedukuhan yang diperkirakan terjadi pada 1 Sura 1367 Saka bertepatan dengan 1 Muharam 1445 Masehi. Padukuhan tersebut semula dinamakan Tegal Alang-Alang (Lemahwungkuk). Kemudian lambat laun disebut dengan "Dukuh Sarumban" yang berarti pusat percampuran penduduk, selanjutnya disebut dengan "Caruban", orang menyebut dengan "Carbon" yang kemudian menjadi "Cirebon" oleh penduduknya disebut "Negara Gede" yang kemudian beralih ucapan menjadi "Garage" kemudian "Grage". Penduduknya telah berjumlah 52 orang yang dipimpin oleh Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang sebagai Kuwu pertama sedangkan Pangeran Cakrabuwana diangkat menjadi wakilnya bergelar Pangeran Cakrabumi. Lihat. T.D. Sudjana, *Rara Yoga*, (Cirebon : tanpa penerbit, 1979), *h.* 2.

daerah Cirebon Girang yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Sunda.

Kerajaan Sunda Pajajaran saat itu memiliki daerah bawahan (*vasal*) yang dikenal dengan Kerajaan Rajagaluh yang letaknya kurang lebih tiga puluh kilometer di sebelah barat Giri Amparan Jati. Kerajaan Rajagaluh dipimpin oleh seorang raja yang sangat kuat yang bergelar Prabu Cakraningrat (Prabu Jayaningrat). Dalam *Babad Tanah Sunda Babad Cirebon*, Prabu Cakraningrat Rajagaluh memerintahkan Adipati Arya Kiban (Palimanan) untuk menyelidiki atas kebenaran berita bahwa di daerah pantai telah banyak orang melakukan pekerjaan menangkap rebon serta telah memproduksi menjadi terasi. Perintah Prabu Cakraningrat ditanggapi oleh Arya Kiban dengan membawa rombongan para mantri kerajaan (*mantri pepitu*) untuk mengunjungi daerah dukuh Lemahwungkuk.[11]

Kunjungan Arya Kiban dan rombongannya, diberi penghormatan khusus oleh Ki Somadullah (Pangeran Cakrabuwana) karena dipandang sebagai duta atau utusan Rajagaluh yang notabene tangan kanan Kerajaan Sunda yang saat itu dipimpin oleh ayahandanya yakni Prabu Siliwangi sehingga Ki Somadullah memberi suguhan hidangan khas yang terbuat dari rebon seperti terasi dan petis pada tamu kehormatannya. Meskipun dalam hidangan yang disajikan

[11] Sulendraningrat, *Babad Tanah Sunda Babad Cirebon*, (Cirebon: 1984), *h.* 2.

para *Mantri Pepitu* lebih menyukai petis (*belendrang*) dari terasi (*grage*) karena dirasa lebih enak.[12]

Pada kesempatan itu juga *Mantri Pepitu* yang dipimpin oleh Adipati Kiban (Adipati Palimanan) mengumpulkan masyarakat sekitar untuk segera menyampaikan perintah rajanya agar pajak tiap tahunnya berupa sepikul bubukan rebon yang sudah halus harus disetorkan ke Rajagaluh. Adanya kewajiban membayar upeti berupa terasi tersebut, menunjukan bahwa perekonomian Cirebon telah tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sementara itu, disaat yang sama *Mantri Pepitu* juga meresmikan dukuh Lemahwungkuk tersebut, dan juga memilih satu di antara mereka sebagai pemimpin atau kuwu atau kepala kampung.[13]

Kemudian diumumkan oleh *Mantri Pepitu* dari Kerajaan Rajagaluh itu bahwa kampung baru itu diberi nama Kampung Lemahwungkuk. Disepakati pula Ki Gedeng Alang-Alang

---

[12] Dalam Babad Cirebon, *Mantri Pepitu* (tujuh pemimpin lokal) yang dipimpin oleh Adipati Arya Kiban Palimanan merupakan pemimpin pejabat tinggi Kerajaan Galuh yang memiliki fungsi mengawasi daerah-daerah yang masuk kekuasaannya atau wilayah kekuasaan Pajajaran (Kerajaan Pusat). Namun istilah ini kemudian dipakai oleh Kerajaan Cirebon pada tahun 1677-1689 dipakai untuk menyebutkan tujuh orang jaksa (jaksa pepitu/mantri pepitu). Menurut Tendi, dkk, Jaksa Pepitu adalah lembaga kejaksaan yang berdiri sejak masa pembagian kekuasaan Cirebon menjadi tiga kekuasaan sampai pengaruh VOC ke ranah hukum pengadilan. Lihat. Tendi, et.al, *Between The Influence Of Customary Dutch, And Islamic Law Jaksa Pepipitu and Their Place in Cirebon Sultanate History,* Diterbitkan oleh Universitas Indonesia dalam Jurnal Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, Volume. 57, No. 1, 2019, *h.* 122.

[13] Kertawibawa, Besta Besuki, *Dinasti Raja Pertapa I Pangeran Cakrabuana Sang Perintis Kerajaan Cirebon,* (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2007), *h.* 45.

sebagai pemimpin atau kuwu dan Ki Somadullah sebagai wakilnya (Raksabumi). Dalam *Manuskrip Purwaka Caruban Nagari* karya Pangeran Arya Carbon mencatat peristiwa tersebut terjadi tahun 1447 Masehi.[14] Dengan demikian, secara tersirat bahwa dukuh Lemahwungkuk menjadi daerah bawahan Kerajaan Raja Galuh dan secara otomatis masuk dalam wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran.

Meninggalnya Ki Danusela (Ki Gedeng Alang-Alang) membuat Haji Abdullah Iman menjadi penggantinya sebagai Kuwu Cirebon kedua.[15] Di bawah kepemimpinannya keadaan Cirebon semakin ramai sehingga Haji Somadullah Iman meningkatkan statusnya menjadi Kerajaan Cirebon dengan Keraton Pakungwati sebagai istananya. Haji Abdullah Iman mengangkat dirinya sebagai penguasa pertama Negeri Cirebon Larang, dan mengganti nama serta bergelar Pangeran Cakrabuwana. Dengan dibangunnya Keraton Pakungwati

[14] Berdasarkan Naskah *Negara Kertabhumi*, diperkirakan pada tahun 1367 Saka bertepatan dengan tahun 1447/1448 Masehi, jumlah masyarakat yang telah menjadi pribumi di Cirebon sebanyak 346 orang. Dengan perincian 182 laki-laki dan 164 perempuan. Adapun pembagian sukunya, 196 orang Sunda, 16 Swarnabhumi, (Sumatra), 4 orang dari Semenanjung Maya, 11 orang dari Arabia, 6 orang dari China dan 3 orang dari Siam. Lihat. Naskah *Negara Kertabhumi*, terj. T.D. Sudjana, Jilid II, 1987, *h.* 10 dan Jilid III, *h.* 5.

[15] Meskipun yang menjadi Kuwu pertama adalah Ki Danusela, namun dalam tradisi lisan masyarakat Islam lokal, gelar Mbah Kuwu justru lebih dilekatkan kepada pangeran Cakrabuwana atau Haji Somadullah Iman, mungkin karena Ki Danusela statusnya beragama Hindu. Lihat. Didin Nurul Rosyidin, *Syekh Nurjati Sang Peletak Dasar Islam Awal Di Cirebon*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2018, *h.* 85.

pada tahun 1452 Masehi ini, menandakan bahwa Cirebon sudah berfungsi sebagai pusat pemerintahan lokal.[16]

Pada tahun 1479 Masehi, kepemimpinan Pangeran Cakrabuwana secara politis digantikan oleh menantunya sekaligus keponakannya yaitu Kanjeng Sinuhun Purba Syekh Syarif Hidayatullah dengan gelar *Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubizaman Kholifaturrasulullah Shallollahu Alaihi Wassalam.* Dengan gelar tersebut, Syekh Syarif Hidayatullah secara otomatis bertanggung jawab penuh sebagai pemimpin Negara dan pemimpin agama di wilayah Tatar Sunda.[17]

Penobatan Kanjeng Sinuhun sebagai Tumenggung Caruban menggantikan Pangeran Cakrabuwana dinilai sangat tepat karena ia merupakan figur yang tepat untuk mengembangkan Islam secara lebih luas. Di sisi lain, Kanjeng Sinuhun memiliki konsep yang visioner dan wawasan berfikir yang internasional sehingga di bawah kepemimpinannya, Syekh Syarif Hidayatullah memutuskan bahwa Cirebon dengan dukungan para wali harus menjadi Negara pusat kekuatan agama Islam yang merdeka terlepas dari kekuasaan Maharaja Sri Baduga Raja Kerajaan Sunda. Atas dasar itulah, Syekh Syarif Hidayatullah mendapat gelar Sinuhun Carbon.

---

[16] Faisal Arif, *Op.cit, h.* 22.

[17] Didin Nurul Rosyidin, dkk, *Kerajaan Cirebon* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI), *h.* 87.

Salah satu langkah pertamanya dalam membangun pemerintahan yang baru yaitu dengan membangun prototipe Kerajaan Islam yang merdeka. Adapun cara yang dilakukannya dengan menghentikan hubungannya dengan Kerajaan Induk, Kerajaan Sunda. Dalam sumber lokal dikatakan bahwa, Sunan Gunung Jati menghentikan hubungannya dengan Kerajaan Pajajaran yakni dengan cara penghentian upeti kepada Rajagaluh sebagai vasal dari Kerajaan Pajajaran. Dalam *Babad Cirebon Naskah Kuningan* disebutkan bahwa upeti atau pajak yang dihentikan berupa terasi, garam, dan petis. Dengan cara tersebut, Cirebon akhirnya menjadi Kerajaan yang merdeka di wilayah Tatar Sunda.[18]

Tindakan Sunan Gunung Jati menghentikan upeti kepada Kerajaan Pajajaran sangat dikecam oleh Prabu Cakraningrat selaku utusan atau tangan kanan dari Kerajaan Pajajaran sehingga secara tidak langsung Cirebon memulai genderang perang dengan Kerajaan Pajajaran. Inilah yang menjadi cikal bakal perlawanan dan persaingan antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran untuk menguasai wilayah-wilayah

[18] Peristiwa merdekanya Cirebon dari Kerajaan Sunda terjadi pada tanggal 12 Bagian Terang Bulan Carita 1404 Saka atau Tanggal 2 April 1482 Masehi. Dalam Hijriah pada tanggal 12 bulan Safar bertepatan dengan hari kamis tahun 887 H. untuk mengenang peristiwa tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon menjadikan peristiwa itu sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon yang diperingati setiap tanggal 2 April. Lihat. A. Sobana Hardjasaputra, dkk, *Cirebon dalam Lima Zaman* (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20), (Bandung : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat), 2011, *h.* 56.

yang menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran seperti Sunda Kelapa, Rajagaluh, Talaga, Banten dan wilayah-wilayah lainnya di Tatar Sunda.[19]

Dalam beberapa sumber lokal Cirebon seperti dalam *Carita Parahyangan, Negarakretabhumi* dan *Carita Purwaka Caruban Nagari* wilayah tersebut merupakan bagian penting bagi Pajajaran untuk mengembangkan kerajaannya menjadi negara maritim yang kuat dan diperhitungkan di Tatar Sunda baik dari segi politik maupun geo-ekonomi.[20] Sedangkan bagi

[19] Tatar Sunda adalah sebutan atau istilah untuk tanah sunda dibagian barat pulau jawa Indonesia. Secara geografi wilayah ini berada diprovinsi Banten (bagian utara), Jakarta (bagian tengah), dan Jawa Barat (bagian selatan). Sebelum gabungnya Kerajaan Sunda dan Galuh, wilayah ini merupakan bekas dari kekuasaan Sunda dan Galuh. Namun, setelah naiknya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, daerah Tatar Sunda seutuhnya merupakan wilayah dari kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Wilayah ini merupakan daerah yang sangat menguntungkan dari sisi politis dan ekonomi, dimana wilayah ini banyak dilalui oleh sungai sungai besar seperti sungai losari dan Celancang (Cirebon), sungai Cimanuk (Indramayu), Sungai Cupunegara (Subang), muara Sungai Citarum (Karawang), Muara Ciliwung (Sunda Kelapa), muara Sungai Cibanten (Banten). Lihat. Faisal Arif, *Op,Cit*, hlm. 32. Lihat juga Tomi Hermawan, *Peran Pangeran Panjunan Dalam Islamisasi Di Cirebon Abad 15 Masehi*, (Cirebon: Diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2019, h. 19

[20] Dengan menguasi pelabuhan-pelabuhan penting di Tatar Sunda, maka secara otomatis kerajaan Pajajaran akan diperhitungkan di Pulau Jawa. Pada abad ke-15 Masehi sebelum Cirebon menjadi negeri yang merdeka, pelabuhan Muara Jati Cirebon menjadi pusat daerah yang sangat menguntungkan bagi kerajaan Pajajaran dalam segi ekonomi. Tidak hanya itu Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa pelabuhan yang sangan potensial seperti pelabuhan Banten, Sunda Kelapa, Pelabuhan Losari dan Pelabuhan Cimanuk. Namun pada tahun 1531, semua pelabuhan penting di Cirebon diambil alih oleh Kerajaan Cirebon akibat perjanjian damai antara Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Cirebon. Lihat. Pangeran Wangsakerta, *Carita Parahyangan Sakeng Bumi Jawa Kulwan Sargah IV*, alih bahasa dan aksara oleh Mukhtar M Zaidin, Ki Tarka Sutarahardja, dan Dodi Yulianto, (Cirebon: 2016), *h.* 140.

Cirebon dengan mengusai wilayah Tatar Sunda secara otomatis akan lebih mudah untuk menyebarkan Islam dan berdakwah di wilayah pedalaman dan pesisir. Di samping itu juga kehadiran Islam di Tatar Sunda akan menjadi warna baru dalam menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam.

Peristiwa kontestasi ini berlangsung sejak diangkatnya Syekh Syarif Hidayatullah menjadi Tumenggung di Caruban tahun 1479 hingga tewasnya Raja Dewata (Raja Pajajaran ke-IV) pada tahun 1543. Dalam kurun waktu 64 tahun kedua Kerajaan ini bersaing memperebutkan wilayah Tatar Sunda yang dianggap penting bagi kedua kerajaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membagi peristiwa kontestasi politik yang terjadi selama 64 tahun tesebut dalam dalam tiga fase (periode).

Pertama, fase awal yang dimulai pada tahun 1479 sampai tahun 1521 merupakan periode di mana dimulainya sebuah persaingan politik antara kerajaan Cirebon dan Kerajaan Pajajaran, di mana kedua kerajaan tersebut terlibat aktif melakukan strategi politik seperti melakukan hubungan bilateral dengan pihak lain untuk memperkuat dan memperluas wilayah kekuasaannya. Kedua, fase operasi militer dan pertempuran yang berlangsung dari tahun 1522-1530. Pada fase ini kedua kerajaan selain masih menjalin kerjasama dengan pihak lain, mereka juga saling melakukan operasi militer gabungan dan terlibat aktif dalam pertempuran. Dalam beberapa literatur lokal, Cirebon terlibat pertempuran

dengan Pajajaran dimulai tahun 1526-1530. Dalam pertempuran tersebut, Kerajaan Cirebon berhasil meruntuhkan kekuatan Kerajaan Pajajaran yang saat itu dibantu oleh Portugis dan para Ratu Wilayah seperti Galuh dan Talaga. Fase yang ketiga atau yang terakhir adalah fase di mana Kerajaan Pajajaran merasa terdesak dan mengakui kekalahan atas Kerajaan Cirebon sehingga pada tahun 1531 Kerajaan Pajajaran berdamai dan melakukan genjatan senjata (mengakhiri pertempuran) dengan Kerajaan Cirebon.

Secara politis perjanjian tersebut tidak hanya mengakhiri pertempuran di antara kedua kerajaan tetapi juga sebagai bentuk kesepakatan di antara kedua kerajaan terkait batas wilayah kekuasaan. Dalam kasus ini, Kerajaan Pajajaran secara resmi telah merelakan wilayah kekuasaannya kepada Kerajaan Cirebon sehingga dalam kurun waktu yang relatif singkat, Syekh Syarif Hidayatullah membagi bekas wilayah Pajajaran tersebut dalam empat bagian wilayah yakni Pajajaran Bagian Timur yang diberikan kepada anaknya Pangeran Hasanudin, Pajajaran Bagian Barat diberikan kepada Sunan Rangga, Pajajaran Bagian Tengah yang diberikan kepada Pangeran Pasarean dan Jakreta (Jayakarta) yang diberikan kepada menantunya Pangeran Fatahillah.[21]

[21]Aman N wahyu, S*ejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati (Naskah Mertasinga)*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 2005), *h.* 9.

Keempat wilayah tersebut merupakan bagian dari kekuasaan Cirebon, sehingga pada fase ini Kerajaan Cirebon telah menguasai hampir dari seluruh wilayah Tatar Sunda. Peristiwa politik ini berlangsung hingga tahun 1543 yang menjadi akhir dari kontestasi politik kedua kerajaan ini. Berangkat dari uraian tersebut, penulis sangat tertarik membahas persaingan politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran secara mendalam. Oleh sebab itu, penulis akan mengangkat sebuat topik sejarah yang berhubungan dengan peristiwa politik yang terjadi di antara dua kerajaan tersebut sehingga penulis mengangkat sebuah judul *Kontestasi Politik Antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Tahun 1479 M-1543 M.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka munculah beberapa pertanyaan pokok dari penelitian ini di antaranya :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Tahun 1479-1543 M?
2. Bagaimana kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Tahun 1479- 1543 M?
3. Bagaimana hasil akhir dari kontestasi politik Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Tahun 1479-1543 M?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi lingkup penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus, yakni :

Pertama, hal yang akan dibahas oleh penulis tentang masalah pokok pada skripsi ini yakni sejauh mana kontestasi politik yang telah berlangsung pada masa itu, di mana Cirebon pada awalnya merupakan sebuah kerajaan vasal dari Kerajaaan Pajajaran yang pada saat itu dipimpin oleh Sri Mangana atau Pangeran Cakrabuwana sebagai Tumenggung.[22] Dengan posisinya itu, maka dapat dikatakan bahwa hubungan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran tidak hanya sebatas hubungan kekeluargaan karena Pangeran Cakrabuwana merupakan anak sulung dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang dikenal sebagai Penguasa Kerajaan Pajajaran. Namun hal ini menandakan bahwa Cirebon secara politik di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang saat itu memiliki kekuasaan hampir seluruh wilayah Tatar Sunda atau Jawa Barat. Dengan demikian, maka Cirebon wajib mengikuti aturan yang diberlakukan Kerajaan Pajajaran, di mana mereka wajib memberi upeti. Adapun upeti yang diberikan kepada Kerajaan Pajajaran berupa hasil bumi lokal masyarakat Cirebon yang berupa terasi dan petis yang dikenal sebagai bahan masakan yang sangat mahal masa itu.

[22] Besta Besuki Kertawibawa, *Op.Cit, h.* 261.

Kedua, hal yang akan dibahas oleh penulis di dalamnya mencakup periode tahun (temporal). Dalam hal ini, tahun yang akan dijadikan sebagai batasan penulisan yakni dimulai tahun 1479 sampai tahun 1543. Tahun 1479 merupakan tahun awal di mana Susuhunan Jati Purba atau Sunan Gunung Jati diresmikan menjadi tumenggung menggantikan pamannya yang sekaligus mertuanya.[23] Sementara batas akhir dari penelitian ini yakni tahun 1543, ketika kondisi Kerajaan Pajajaran sudah melemah dan menyerah kepada Cirebon akibat dari perjanjian damai tahun 1531 yang berakhir dengan meluasnya wilayah Kerajaan Cirebon serta banyaknya pemeluk Islam. Tidak hanya itu, akibat dari perjanjian tersebut secara politis dan keagamaan banyak di antara ratu wilayah yang dulu taat dan patuh pada aturan Pajajaran, namun setelah perjanjian damai tersebut dan dikuasainya wilayah kekuasaan Pajajaran, maka secara politis mereka beralih tunduk dan patuh pada aturan dan dakwah dari Sunan Gunung Jati. Ditambah lagi di tahun 1543 Pangeran Hasanudin yang saat itu merupakan bupati Banten dan bagian dari vasal Kerajaan Cirebon menyerang Kerajaan Pajajaran yang berakhir dengan tewasnya Raja Dewata (Raja Pajajaran ke-3)[24] sehingga akibat dari penyerangan ini kekuasaan Cirebon semakin meluas.

[23] Didin Nurul Rosyidin, *Syekh Nurjati Sang Peletak Dasar Islam Awal Di Cirebon*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), *h.* 100.

[24] *Ibid, h.* 134.

Ketiga, hal yang juga akan dibahas oleh penulis yakni mengenai batasan wilayah (spatial) yang dijadikan sebagai penelitian. Adapun wilayah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi Cirebon sebagai sebuah Kerajaan Islam yang berkembangan pada masa itu. Di sisi lain, penulis juga akan membahas mengenai wilayah Kerajaan Pajajaran yang memiliki luas kekuasaan hampir seluruh daerah Jawa Barat. Jadi, dalam penelitian ini penulis membatasi tempat penelitian hanya wilayah-wilayah yang dikuasai Kerajaan Pajajaran yakni di Jawa Barat yang dikenal sebagai wilayah Tatar Sunda.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang dapat penulis uraikan dari penelitian ini di antaranya :

1. Agar dapat mengetahui latar belakang terjadinya kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Tahun 1479-1543 M.
2. Agar dapat mengetahui kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Tahun 1479-1543 M.
3. Agar dapat mengetahui bagaimana hasil akhir dari kontestasi politik Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Tahun 1479-1543 M.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap khazanah intelektual Islam

terkait dengan penulisan atas rekonstruksi sejarah Cirebon khususnya dan umumnya Sejarah Jawa Barat. Dengan harapan dapat menjadi masukan bagi para peneliti di masa yang akan datang tentang Kerajaan Cirebon dan Jawa Barat dalam segi politik kerajaan. Di samping itu, tulisan ini diharapkan untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Cirebon, terutama tentang peristiwa politik yang terjadi di wilayah Cirebon dalam rangka menjaga integritasnya dari pengaruh asing seperti imperialisme Portugis. Dan Pengaruh Kerajaan Pajajaran yang saat itu melakukan hubungan bilateral kepada Portugis. Sehingga agama Islam sebagai identitas Kerajaan Cirebon tidak hancur karena politisasi Kerajaan Pajajaran.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membutuhkan referensi untuk menambah pengkayaan kajian tentang Cirebon yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka. Sumber-sumber kepustakaan yang digunakan dalam kajian ini, baik sumber primer, sukender maupun tersier akan memberikan pengetahuan dasar dalam memahami sejarah Cirebon dengan segala dinamika dan problematika yang menyertainya.

Penelitian mengenai Kerajaan Cirebon dan Pajajaran tentu telah banyak dibahas oleh para ahli dan peneliti sebelumnya, akan tetapi pembahasan mengenai kontestasi

politik yang terjadi antara kedua kerajaan tersebut perlu pembahasan lebih lanjut, maka dari itu diperlukan berbagai sumber guna memberikan informasi yang sesuai mengenai topik yang akan dibahas. Penelusuran sumber-sumber pustaka adalah langkah yang dilakukan oleh penulis untuk kebutuhan referensi baik itu sumber primer maupun sekunder. Berikut merupakan tulisan-tulisan terkait Kerajaan Cirebon dan Pajajaran diantaranya:

1. Heru Erwanto, *Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon* yang dipublikasikan dalam Patanjala Vol. 4, No.1, Mei 2012: 170-183 penerbit Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Bandung. Artikel tersebut menjelaskan secara singkat sejarah Cirebon di masa kerajaan, bagaimana Cirebon berupaya memisahkan diri dari kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran, keberhasilan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga ke Banten, Galuh dan Talaga dan penguasaaan pelabuhan Sunda Kelapa menjadikan Cirebon sebagai kerajaan yang pesat di semua bidang, terutama pada sektor perdagangan menjadikan perekonomian kerajaan kuat dan stabil.[25] Meskipun dalam tulisannya sekilas membahas mengenai Kerajaan Cirebon, namun tidak spesifik membahas mengenai hubungan antara Kerajaan

[25] Heru Erwanto, "Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon", *Patanjala* Vol. 4 No.1 (Mei, 2012) *h.* 170-183.

Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran dan kaitannya dengan kontestasi politik yang terjadi antara dua kerajaan tersebut. Sedangkan skripsi ini fokus pada kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Pajajaran

2. Artikel yang disusun oleh Siti Fauziyah, berjudul *Kiprah Sunan Gunung Jati Dalam Membangun Kekuatan Politik Islam di Jawa Barat* yang dipublikasikan dalam Jurnal Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya Vol. 13, No. 1, 2015: 85-98 penerbit Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Dalam penelitian tersebut, Siti Fauziyah mendeskripsikan tentang Peran besar Sunan Gunung Jati dalam proses islamisasi di Jawa Barat serta keberhasilannya membangun kekuatan politik di Jawa Barat khususnya di Kerajaan Cirebon yang merupakan wilayah kekuasaannya. [26] Meskipun di dalam tulisannya membahas mengenai perkembangan politik Cirebon, namun tidak spesifik membahas mengenai hubungan antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran terkait dengan kontestasi politik kedua kerajaan tersebut. Sedangkan skripsi ini fokus

[26] Siti Fauziyah, berjudul "Kiprah Sunan Gunung Jati Dalam Membangun Kekuatan Politik Islam di Jawa Barat" *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya* Vol. 13 No. 1 (2015) *h.* 85-98.

pada kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Pajajaran.

3. Skripsi yang disusun oleh Fitri Anggraini Fatimatul Khoiroh (2017), Mahasiswi Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, dalam skripsinya yang berjudul *Peranan Sunan Gunung Jati Dalam Penyebaran Agama Islam di Cirebon Tahun 1480-1570 M*, mendeskripsikan mengenai peranan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam melalui berbagai strategi dakwah diantaranya perdagangan, sosial budaya, pendidikan, dan politik.[27] Meskipun dalam tulisannya sekilas membahas tentang Cirebon dan proses islamisasinya, namun tidak spesifik membahas mengenai hubungan antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran terkait dengan kontestasi politik kedua kerajaan tersebut. Sedangkan skripsi ini fokus pada kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Pajajaran.
4. Skripsi yang disusun oleh Aminullah (2015) mahasiswa Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsinya yang

[27] Fitri Anggraini Fatimatul Khoiroh, Skripsi: *"Peranan Sunan Gunung Jati Dalam Penyebaran Agama Islam di Cirebon Tahun 1480-1570 M"* (Jember: Universitas Jember, 2018).

berjudul *Peranan Sunan Gunung jati dalam Islamisasi di Kesultanan Cirebon* mendeskripsikan mengenai profil hidup Sunan Gunung Jati, Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dengan menerapkan strategi dalam upaya pengembangan agama Islam di Cirebon dengan berbagai pendekatan yaitu melalui agama, ekonomi, politik, dan kultural. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat Islam dapat menyebar ke wilayah Jawa Barat dan khususnya di Cirebon.[28] Meskipun dalam skripsi ini sekilas menjelaskan tentang Cirebon, namun dalam tulisannya tidak spesifik membahas hubungan antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran terkait dengan kontestasi politik dua kerajaan tersebut. Sedangkan skripsi ini fokus pada kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Pajajaran.

Dari berbagai tulisan karya ilmiah, buku dan penelitian terdahulu terkait politik masa kerajaan Cirebon hanya sebagian kecil yang membahas mengenai perluasan wilayah, masa kemajuan dan kemunduran kerajaan Cirebon dan berbagai strategi Sunan Gunung Jati dalam upayanya memimpin kekuasaan di wilayah Jawa Barat serta strategi dakwahnya yang mampu memperluas penyebaran agama

[28] Aminullah, Skripsi: *"Peranan Sunan Gunung jati dalam Islamisasi di Kesultanan Cirebon*", (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015).

Islam. belum ada yang spesifik membahas memgenai kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Sunda Pajajaran pada tahun 1479-1543 yang akan dibahas oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini.

F. Landasan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontestasi adalah kontroversi atau perdebatan.[29] Kontestasi mengandung pengertian bahwa ada pihak-pihak yang bertentangan sehingga menimbulkan *clash of argument*. Di dalam lingkup ini ada pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap sumber-sumber masalah yang memotivasi tindakan-tindakan.[30] Secara sederhana, kontestasi dapat diartikan sebagai pertarungan berbagai macam kelompok, masing-masing memperjuangkan ideologi, nilai, solusi, dan sebagainya. Kontestasi menggunakan arena sebagai panggung pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan.[31]

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang artinya negara-kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan) dalam hidupnya. Gabriel

---

[29] Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Offline*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Jakarta.

[30] Basuki Agus Suparno, *"Kontestasi makna dan dramatisme komunikasi politik tentang reformasi di Indonesia",* Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.8 No. 1(Januari-April, 2010), *h.* 4.

[31] Heri Budianto, *Kontestasi Politik Dalam Ruang Media Perspektif Critical Discourse Analysis*, (Prenada Media: Jakarta), *h.* 13.

A. Almond, mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrument yang sifatnya *otoritatif* (berwenang secara sah) dan *koersif* (bersifat memaksa). Dalam hal ini, Politik mengacu pada penggunaan instrument *otoritatif* dan *koersif*.[32]

Pada Umumnya politik adalah usaha untuk menentukan peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Dalam menentukan peraturan dan kebijakan akan menimbulkan konflik apabila terjadi pertentangan terkait dengan keputusan yang diambil. Politik tidak akan jauh dari perebutan kekuasaan, takhta dan harta.[33]

Peter Merkl berpendapat bahwa politik yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Selaras dengan itu, menurut Rod Hague politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Andrew Heywood mengungkapkan bahwa politik merupakan kegiatan suatu bangsa yang bertujuan

[32] Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia,* (Bandung: CV Pustaka Setia), 2013, *h.* 3.

[33] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), *h.* 15.

untuk membuat, mempertahankan, mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya. Yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.[34]

Dari definisi "kontestasi" dan "politik" yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang dimaksud dengan kontestasi politik adalah persaingan antara dua kelompok atau lebih yang memperjuangkan dan mengupayakan untuk menguasai wilayah, ekonomi, hingga ideologi atau agama yang mengakibatkan konflik antar dua kelompok atau lebih. persaingan tersebut masing-masing memperjuangkan nilai, ideologi, kekuasaan, dan kedudukannya.

Terkait dengan penulisan skripsi ini, peneliti akan membahas mengenai kontestasi politik yang terjadi pada masa Kerajaan Cirebon yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Cirebon saat itu dengan memperluas pengaruh kekuasaannya di Tatar Sunda dengan misi dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut strauss dan Corbin mendefinisikan metode kualitatif sebagai "jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya".

[34] *Ibid, h.* 16.

kemudian metode penelitian kualitatif didefinisikan juga dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka[35]. Maka dari itu, penelitian kualitatif yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan studi pustaka guna mendapatkan sumber yang akurat untuk penelitian tentang kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Pajajaran pada tahun 1479-1543 M. Terdapat empat tahapan dalam metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa yunani *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber. Sumber yang dimaksud dalam kaitannya dengan sejarah ialah sumber sejarah yaitu berupa catatan, kesaksian, serta fakta-fakta lain yang dapat mengungkap suatu peristiwa kehidupan manusia yang telah lalu. Heuristik yaitu tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak masa lampau. [36] Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya *pengantar ilmu sejarah*,

[35] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2016), *h.* 12.

[36] Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), *h.* 39.

dalam melakukan heuristik, sumber yang didapat harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Dalam penelitian kualitatif, sumber sejarah yang diperoleh terbagi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder atau tertulis dan tidak tertulis.

Sumber primer atau *primary sources* adalah bila sumber atau penulis sumber menyaksikan, mendengar sendiri (*eye-witness atau ear-witness*), atau mengalami sendiri (*the actor*) peristiwa yang dituliskan dalam sumber tersebut. [37] Adapun sumber primer yang digunakan penulis diantaranya; batu peringatan (Padrao) yakni bentuk simbolis perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran yang berangka tahun 1522 M. Surat Perjanjian kerja sama yang ditandatangi oleh Prabu Surawisesa dan Portugis.

Sedangkan sumber sekunder adalah bila sumber atau penulis sumber hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Bisa dipahami pula bahwa sumber primer adalah sumber pertama artinya sumber dari pelaku sejarahnya langsung dan sifat keakuratannya lebih kuat ketimbang sumber sekunder karena sumber sekunder adalah sumber dari orang kedua artinya ada kemungkinan tambahan cerita atau peristiwa yang disampaikan oleh orang kedua yang memberikan opininya terhadap peristiwa sejarah tersebut dalam keterangannya. Adapun sumber sekunder

[37] *Ibid, h.* 38.

yang digunakan oleh penulis yakni *Purwaka Caruban Nagari*, *Negarakerthabumi*, *Carita Parahyangan*, *Suma Oriental Tome Pires (1512)*, buku *Kerajaan Cirebon*, *Cirebon dalam Lima Zaman*, *Uit Cheribon's Geschiedenis Gedengboek der Gementee* dan lain sebagainya. Maka penulis perlu teliti dalam mengambil sumber-sumber yang akan digunakan.

2. Kritik

Setelah peneliti melalui proses heuristik maka proses selanjutnya yaitu tahapan Kritik atau verifikasi sumber sejarah, yaitu tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak masa lampau. Sumber-sumber yang telah diperoleh dan terkumpul tersebut baik berupa sumber primer ataupun sekunder, selanjutnya diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik baik yang bersifat intern maupun ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. ini biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber.[38]

Dalam hal ini peneliti diharuskan menguji sumber yang sudah ada dari auntensitasnya, misalnya sumber

[38] M. Dien Majdid Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), *h. 223-225.*

tersebut berupa tertulis, maka perlu diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, hurufnya, dan semua tampilan luarnya guna mengetahui autentisitasnya.[39]

3. Interpretasi

Yaitu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh.[40] Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita. Fakta-fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah. Selanjutnya interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Interpretasi analisis, dengan menguraikan fakta satu persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta itu. dari situlah dapat ditarik sebuah kesimpulan.
b. Interpretasi sintesis, yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.

Interpretasi atau penafsiran bersifat individual sehingga seringkali subjektif. Dalam melakukan proses interpretasi, penulis juga dituntut untuk imajinatif.[41]

---

[39] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Tiara Wacana, 2013), *h.* 77.
[40] Nina Herlina, *Op.Cit*, *h.* 39.
[41] M. Dien Majdid, Johan Wahyudi, *Op.Cit.*, *h.* 225-227.

4. Historiografi

Ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Pada tahap inilah penulisan sejarah dilakukan historiografi merupakan fase atau langkah akhir dari beberapa fase yang biasanya harus dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.[42]

Historiografi juga didefinisikan sebagai tahapan atau kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imaginatif masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya. dengan kata lain, tahapan historiografi itu ialah tahapan kegiatan penulisan. [43] Menurut Kuntowijoyo, dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting. Menurutnya, penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) pengantar (2) hasil penelitian, (3) simpulan.[44]

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan tulisan mengenai Kontestasi Politik Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan pajajaran, maka dalam penyusunan skripsi ini akan disusun secara sistematis dalam lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

---

[42] *Ibid, h.* 230-231.
[43] Nina Herlina, *Op.Cit, h.* 39.
[44] Ibid, *h.* 40

Bab I pendahuluan yang terdiri dari sub-sub yaitu: Latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran tentang seluruh rangkaian penulisan penelitian sebagai dasar pijakan bagi pembahasan berikutnya.

Bab II akan menguraikan tentang Sekilas Sejarah Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Pajajaran yang akan diuraikan dalam tiga subbab yakni sebagai berikut; Gambaran Umum Derah Jawa Barat, Sekilas sejarah Kerajaan Cirebon dan Sekilas Sejarah Kerajaan Pajajaran.

Bab III akan menguraikan tentang latar belakang terjadinya kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran tahun 1479-1543 yang akan diuraikan dalam dua subbab yakni sebagai berikut; hubungan Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran dan faktor yang melatarbelakanginya.

Bab IV akan menguraikan Kontestasi Politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran pada tahun 1479-1543 yang akan diuraikan dalam dua subbab pembahasan yakni sebagai berikut; kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran yang akan dijabarkan dalam tiga fase (periode) dan hasil akhir dari peristiwa kontestasi politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran.

Bab V dalam bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis diharapkan dapat mengambil benang merah dari uraian sebelumnya menjadi rumusan yang bermakna.

I A I N
SYEKH NURJATI
C I R E B O N